

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum.....	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.3.1 Maksud	3
	1.3.2 Tujuan.....	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (RENJA-DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	14
	2.2.1 Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	14
	2.2.2 Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	14
	2.2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	15
	2.2.4 Struktur Organisasi.....	16
	2.2.5 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	18
	2.2.6 Kinerja Pelayanan pada Masing-masing Bagian/Bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	21
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	29
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)	38
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN.....	63
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	63
3.2	Tujuan dan Sasaran Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	64
3.3	Program dan Kegiatan	65
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	83
4.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....	83

BAB V PENUTUP 88

DAFTAR TABEL

2.1	Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.....	7
2.2	T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	11
2.3	Jumlah Pegawai (PNS/Non PNS) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Jenis Kelamin dan Pendidikan.....	18
2.4	Sebaran Jumlah PNS dan Non PNS Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Sekretariat dan Bidang di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur per Tahun 2022.....	19
2.5	Sarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	21
2.6	T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	28
2.7	Rekapitulasi Inputan Kuisioner Status Indeks Desa Membangun Tahun 2021 di Aplikasi IDM Tahun 2020 Povinsi Kalimantan Timur.....	30
2.8	T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	38
2.9	T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	55
3.1	T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	72

DAFTAR BAGAN

2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 17

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perencanaan yang spesifik. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Perencanaan disusun baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, yang diarahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Secara legal dan formal penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2022 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur;

14. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan untuk adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dengan demikian penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2022.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk memastikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah;

- b. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan;
- c. Sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- d. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- e. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Proses dan sistematika penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

- 4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (RENJA-DPMPD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas dan fungsinya mendukung capaian Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu ***“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”***, melalui Misi 1 yaitu ***“Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.”***, menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Perubahan Renja tahunan yang dimulai pada tahun 2022.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2022 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 24,055,409,086.00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribuan Delapan Puluh Enam Rupiah) terdiri dari 5 (Lima) program, 11 (Sebelas) kegiatan, dan 55 (Lima Puluh Lima) sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Kalimantan Timur

No	Program	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
			2	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
			3	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
			4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			5	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			6	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
			7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
			8	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
			9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
			10	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
			11	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
			12	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			13	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	14	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
			15	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat

		yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			17	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			18	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			19	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
			20	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
3.	PROGRAM PENATAAN DESA	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	21	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
4.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	22	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
			23	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
			24	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			27	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			28	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			29	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			31	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
			33	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

				Anggaran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			36	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			37	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			39	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			44	Pengadaan Mebel
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			46	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			47	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			48	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			50	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
			51	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			52	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			53	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP
			55	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan Tahun 2021 rata-rata mencapai 100%, sedangkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan Tahun 2022 masih dalam Proses berjalannya Tahun Anggaran.

Adapun Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Tahun lalu dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan pada **Tabel T-C.29** sebagai berikut :

Tabel 2.2 T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

PD : IAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2018-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021	
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Prog dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 07	URUSAN WAJIB									
2 07 01	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA									
2 07 01 07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen	90 persen
2 07 01 07 01	Pelaksanaan Administrai Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	90 persen	12 bulan	12 bulan	90 persen
2 07 01 08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2 07 01 08 02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	90 persen	12 bulan	12 bulan	90 persen
2 07 01 09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2 07 01 09 01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	80 persen	25 Kegiatan	25 Kegiatan	80 persen
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	250 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	50 kegiatan	80 persen	50 kegiatan	50 kegiatan	80 persen
		Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	80 persen	12 bulan	12 bulan	80 persen
2 07 01 09 01	Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2 07 01 09 01	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran	Jumlah dokumen Perencanaan dan anggaran	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	80 persen	10 Dokumen	10 Dokumen	80 persen
2 07 01 09 01	Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah Laporan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	80 persen	8 Dokumen	8 Dokumen	80 persen
2 07 01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	175 LKD	35 LKD	35 LKD	35 LKD	100 persen	35 LKD	35 LKD	100 persen
2 07 01 15 01	Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah pelaksanaan BBGRM yang di bina	10 Kab/Kota	6 Desa/Kamp/Kel	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	70 persen	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	70 persen
		Jumlah pelaksana posyandu yang dibina	36 Posyandu	6 posyandu	6 posyandu	6 posyandu	70 persen	6 posyandu	6 posyandu	70 persen
		Jumlah pelaksana PMT-AS yang dibina	0	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Pelaksana LPM yang dibina	10 Kota	10 Kota	10 Kota	10 Kota	70 persen	10 Kota	10 Kota	70 persen
		Jumlah Pelaksana PKK yang dibina	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	70 persen	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	70 persen
2 07 01 15 03	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat	Penyebaran Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara optimal	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen
2 07 01 15 08	Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	750 orang	150 orang	150 orang	150 orang	70 persen	150 orang	150 orang	70 persen
2 07 01 15 09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang dibina	25 MHA	5 MHA	5 MHA	5 MHA	70 persen	5 MHA	5 MHA	70 persen
2 07 01 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Masyarakat	80 persen		80 persen	80 persen	80 persen		80 persen	80 persen

					Jumlah Pasar Desa yang aktif	0	-	-	-	0	-	-	0	
2	07	01	16	01	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase BUMDesa aktif	150 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	80 persen	15 Desa	15 Desa	80 persen
								2,9 Persen	2,9 Persen	2,9 Persen	80 persen	2,9 Persen	2,9 Persen	80 persen
					Jumlah Pasar Desa yang aktif	0	-	-	-	0	-	-	0	
					Jumlah Bumdesa yang terbentuk	75 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	80 persen	15 Unit	15 Unit	80 persen	
					Laporan	0	-	-	-	0	0	0	0	
2	07	01	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	17	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan PMD	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	21		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya sinergitas kebijakan dan program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	21	01	Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	22		Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	80 persen	18 Unit	18 Unit	80 persen
2	07	01	22	01	Pemasyarakatan dan pengembangan penerapan teknologi tepat guna	Jumlah Kelompok Masyarakat pemanfaatan TTG yang mempunyai Daya Saing Pasar	90 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	80 persen	18 Unit	18 Unit	80 persen
2	07	01	22	02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan konservasi lingkungan perdesaan/kecamatan	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	80 persen	10 Unit	10 Unit	80 persen
2	07	01	26		Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Terwujudnya Ketahanan dan Kelestarian Keluarga	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	26	01	Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotongroyongan	Jumlah TP PKK yang dibina	650 orang	130 orang	130 orang	130 orang	80 persen	130 orang	130 orang	80 persen
2	07	01	26	02	Penguatan Kapasitas Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader PKK yang dilatih	750 Orang	150 orang	150 Orang	150 Orang	80 persen	150 orang	150 Orang	80 persen
2	07	01	26	03	Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga	Jumlah Keluarga/Kader PKK yang dibina	800 Orang	160 orang	160 Orang	160 Orang	80 persen	160 Orang	160 Orang	80 persen
2	07	01	26	04	Pengembangan dan monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	Jumlah Kader PKK/Keluarga yang dibina	1500 orang	300 orang	300 orang	300 orang	80 persen	300 orang	300 orang	80 persen
					Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat									
2	07	01	27			Meningkatnya Masyarakat Miskin perdesaan yang mandiri dalam Agribisnis TTG, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	27	01	Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin perdesaan yang mandiri dalam agribisnis teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	50 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	80 Persen	10 Posyantek	10 Posyantek	80 Persen
2	07	01	28		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	28	01	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Data Aparatur Desa/Kelurahan dan BPD yang belum dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	80 persen	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	80 persen
						Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Aparatur Desa/Kelurahan dan BPD yang belum dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen
						Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Pembinaan	150 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	80 persen	15 Desa	15 Desa	80 persen
								2,9 Persen	2,9 Persen	2,9 Persen	80 persen	2,9 Persen	2,9 Persen	80 persen

2	07	01	28	02	Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan Pengelolaan Dana Desa	7 Kabupaten	7 Kabupaten	7 Kabupaten	7 Kabupaten	80 persen	7 Kabupaten	7 Kabupaten	80 persen
						Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	80 persen
2	07	01	28	03	Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	80 persen	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	80 persen
						Jumlah Desa/Kelurahan Berprestasi	30 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	80 persen	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	80 persen
2	07	01	29		Program Pembangunan Desa dan kawasan	Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan yang Optimal	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen
2	07	01	29	01	Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Jumlah Kabupaten yang berhasil dibina	25 Kabupaten	5 Kabupaten	5 Kabupaten	5 Kabupaten	80 persen	5 Kabupaten	5 Kabupaten	80 persen
						Pendamping Desa yang Berhasil dibina	250 orang	50 orang	50 orang	50 orang	80 persen	50 orang		80 persen
						Persentase Desa dengan Status Berkembang	150 Desa	15 Desa	15 Desa	15 Desa	80 persen	15 Desa	15 Desa	80 persen
								2.9 Persen	2.9 Persen	2.9 Persen	80 persen	2.9 Persen	2.9 Persen	80 persen
					Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Tercapainya Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80 persen	1 Laporan	1 Laporan	80 persen
2	07	01	29	02										
						Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80 persen	1 Laporan	1 Laporan	80 persen
					Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan	Penyebaran Data dan Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan dan Antar Desa	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	80 persen	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	80 persen
2	07	01	29	03		Tercapainya Data dan Informasi Pembangunan Desa/Kelurahan dan Antar Desa	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80 persen	1 Laporan	1 Laporan	
2	07	01	30		Program Kampung Iklim+	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen	70 persen
2	07	01	30	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development/VLED	Jumlah Desa yang menjadi Desa/Kampung/Kelurahan Iklim	150 Desa	-	20 Desa	20 Desa	80 persen	22 Desa	22 Desa	80 persen
						Persentase Desa yang menjadi Desa/Kampung/Kelurahan Iklim		-	2.4 Persen	2.4 Persen	80 persen	2.6 Persen	2.6 Persen	80 persen

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya/tahun lalu dalam rangka mengentaskan/mengurangi jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kalimantan Timur dengan strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran meningkatkan jumlah Desa Berkembangan, dan mendorong Desa Berkembang menjadi Maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri.

Rancangan Perubahan Renja Tahun 2022 yang merupakan awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan 35 Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di 7 (tujuh) Kabupaten se- Kalimantan Timur untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa Berkembang.

2.2.1. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2.2.2. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- 2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- 3) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- 4) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- 5) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 6) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan Kelurahan;
- 7) Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- 9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

2.2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

a. Tujuan:

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

b. Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Wilayah Perdesaan Secara Merata

c. Strategi:

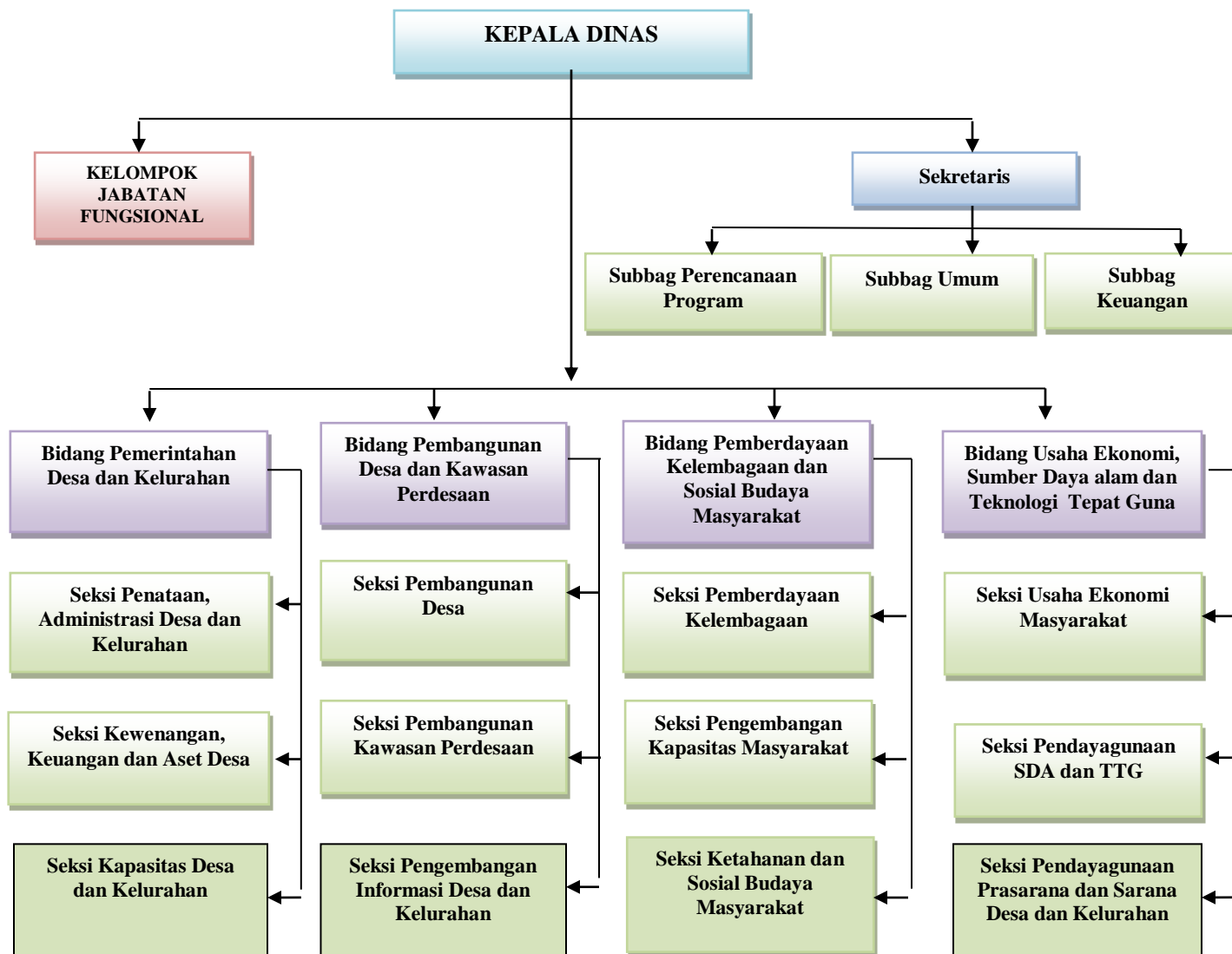
- 1) Pemantapan dan Peningkatan Peran Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat;
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Membangun Desa Berkualitas;

- 4) Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan Secara Partisipatif;
 - 5) Penguatan Ketangguhan Desa dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim
- d. Arah Kebijakan :
- 1) Peningkatan BUMDes yang Aktif untuk Meningkatkan Ekonomi Desa;
 - 2) Optimalisasi Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa untuk Mencapai Status Desa Berkembang;
 - 3) Pembinaan Kapasitas Desa yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Anggaran;
 - 4) Peningkatan Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
 - 5) Pembinaan dan Pengembangan Desa/Kampung Rendah Emisi

2.2.4.Struktur Organisasi

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



2.2.5. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

A. Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2022 memiliki jumlah pegawai sebanyak 82 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai (PNS/Non PNS)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Jenis Kelamin dan Pendidikan

(Jumlah PNS)

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
11	25	4		20	21	0	12	21	1	5	0	0	40

(Jumlah Non PNS)

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
-	-	-		26	16	2	19	5	15	0	1	42

Sumber data: DPMPD Provinsi Kaltim

Tabel 2.4
Sebaran Jumlah PNS dan Non PNS Menurut Pendidikan dan Jenis
Kelamin pada Sekretariat dan Bidang di Lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
Kalimantan Timur per Tahun 2022

(Jumlah PNS)

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N														JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	1	2	-	-	3	9
2	Bid.Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya masy.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	4	4
3	Bidang Usaha Eko Masy. Dan TTG	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	4	3
4	Bidang Pemdes dan kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	4	1
5	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaaan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	-	-	4	4

(Jumlah Non PNS)

NO.	BAGIAN / BIDANG	P E N D I D I K A N														JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	1	-	-	-	9	1	2	1	3	6	-	1	-	-	15	9
2	Bid.Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya masy.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
3	Bidang Usaha Eko Masy. Dan TTG	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	3	4
4	Bidang Pemdes dan kelurahan	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	3	2
5	Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaaan	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1

Sumber data: DPMPD Prov. Kaltim

B. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaahn Desa Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	SARANA KERJA YANG TERSEDIA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Tanah dan Bangunan kantor	8.228 m2	Baik
2.	Gedung	3 lantai	
3.	Kendaraan Roda 4	8 buah	Baik
4.	Kendaraan Roda 2	4 buah	Baik
5.	Komputer PC	16 buah	Baik
6.	Laptop	17 buah	Baik
7.	Mesin Tik	15 buah	Baik
8.	Telepon	1 unit	(0541) 7779725/ Baik
9.	Telepon/Faximil	1 Unit	(0541) 7779726 / Baik
10.	Mesin Foto Copy	1 unit	Kurang Baik
11.	AC	20 buah	Baik
12.	Listrik	1 jaringan	Baik
13.	Air	1 jaringan	Baik
14.	Telepon	2 jaringan	Baik
15.	Area Parkir	3 area	Baik
16.	Ruang Rapat	2 ruang	Baik
17.	Taman	1 area	Baik
18.	Masjid	1 unit	Baik

Sumber data : DPMPD Provinsi Kaltim

2.2.6 Kinerja Pelayanan pada masing-masing Bagian/Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Sekretariat

- Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- Memfasilitasi Kebijakan Perencanaan Regulasi yang mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Mengkoordinir penyusunan, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran;
- Memfasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan karir bagi Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- Memfasilitasi Diseminasi dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
- Meningkatkan kualitas hubungan dengan Perangkat Daerah/Instansi Terkait.

2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- Melaksanakan pengkajian pengembangan program Bidang Pemerintahan desa/kampung dan Kelurahan;
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan;
- Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa;
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, berkenaan dengan manajemen pemerintahan desa/kampung dan kelurahan, penguatan kapasitas sekretaris desa, pengelolaan keuangan desa atau kampung (ADD/ADK), Bimtek sistem informasi keuangan desa, administrasi desa/kampung dan kelurahan, Penyusunan peraturan desa/kampung, serta laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan kelurahan;
- Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, serta fasilitasi tanah kas desa;
- Fasilitasi pengelolaan aset desa;

- Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang bantuan keuangan pemerintahan desa;
- Sosialisasi regulasi tentang pemerintahan desa;
- Lomba desa dan kelurahan;
- Lomba cerdas cermat desa dan kelurahan;
- Fasilitasi penataan kode desa dan kelurahan;
- Fasilitasi pemilihan kepala desa;
- Fasilitasi penataan desa dan kelurahan;
- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kampung dan kelurahan, serta data pengelolaan keuangan Desa/Kampung; dan
- Fasilitasi administrasi pemerintahan desa.

3. Bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan

- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pembangunan desa;
- Melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- Mengumpulkan Dan mengolah data pembangunan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat pedesaan sesuai dengan kewenangan lokal;
- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan lintas sektor masuk ke desa berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pemetaan penempatan dan relokasi pendamping desa;
- Melaksanakan rekrutmen, monitoring dan evaluasi kegiatan pendamping desa;
- Melakukan fasilitasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan;

- Melakukan pembinaan fasilitasi perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan;
- Memperkuat kebijakan perencanaan tata ruang dan rencana pengembangan desa yang mendukung program pengurangan emisi (fasilitasi regulasi);
- Mengembangkan Desa rendah emisi berbasis pemberdayaan masyarakat (implementasi);
- Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan pilot project pembangunan kawasan perdesaan;
- Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan perdesaan;
- Melakukan pembinaan dan pengembangan informasi desa dan kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi desa dan kelurahan meliputi pendayagunaan data profil Desa/Kampung dan kelurahan, sistem informasi posyandu, dan perkembangan desa; dan
- Melakukan pengembangan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

- Melaksanakan pengkajian pengembangan program bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- Melaksanakan Pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui partisipasi pelestarian lingkungan hidup dalam rangka pengurangan emisi;
- Melaksanakan pembinaan peningkatan ketahanan dan sosial budaya masyarakat;

- Fasilitasi dan peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap HIV-AIDS, Panyalahgunaan narkoba dan penyakit menular/tidak menular melalui Lembaga Masyarakat Kaltim Sehat (LMKS);
- Pembinaan dan peningkatan peran aktif kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan melalui revitalisasi dan optimalisasi peran posyandu;
- Memberikan pembinaan, pelayanan data dan peningkatan peran aktif yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Memfasilitasi pelaksanaan perlombaan pelaksana terbaik gotong royong masyarakat;
- Memberikan pembinaan dan peningkatan peran aktif Kader PKK dan pelayanan data yang berkaitan dengan PKK;
- Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
- Memberikan pembinaan dan fasilitasi pemantapan nilai-nilai budaya adat serta peningkatan kapasitas dan pelestarian adat maupun penyediaan data Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
- Memberikan Fasilitasi pembinaan Pengarustamaan Gender (PUG).

5. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

- Melaksanakan pengkajian dan pengembangan Program yang berkaitan dengan usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat;

- Memperkuat dan mengembangkan Ekonomi Masyarakat berkelanjutan (pertanian, aquakultur) berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pendayagunaan TTG;
- Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana perdesaan;
- Membuat pedoman pelaksanaan programi/kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA dan TTG;
- Memberikan bimbingan teknis dan pembinaan Pasar Desa, Lumbung Pangan Masyarakat Desa;
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Memberikan fasilitasi bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Perdesaan;
- Memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berwirausaha, dan selanjutnya memberikan pembinaan sehingga menjadi usaha yang berhasil;
- Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM
- Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Penanggulangan Kemiskinan;
- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan Penduduk Miskin, Pasar Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam;
- Melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, serta Warung Teknologi Perdesaan (Wartekdes);
- Memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengelola Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek);
- Memfasilitasi promosi dan informasi produk teknologi tepat guna unggulan yang ramah lingkungan melalui Gelar Teknologi Tepat Guna;

- Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam;
- Memberikan pelayanan data yang berkaitan dengan teknologi tepat guna; dan
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development/VLED (Kampung Iklim).

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana disajikan pada **Tabel T-C. 30** sebagai berikut :

Tabel 2.6 T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Provinsi Kalimantan Timur

[illegible]

[illegible]

12	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mengelola keuangan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	5 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan	1 pelaporan
13	Jumlah Masyarakat Miskin Perdesaan yang melakukan Ekonomi Agribisnis melalui Pemanfaatan TTG, Penguatan Kelembagaan Masy dan Pem des, Usaha Ekonomi Masy. Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dan	Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat miskin melalui Pemanfaatan TTG, Penguatan Kelembagaan Masy dan Pem des, Usaha Ekonomi Masy. Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	50 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek	10 Posyantek
14	Jumlah Laporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan yang Optimal	Mewujudkan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Berbasis Pemberdayaan yang Optimal	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina	7 Kabupaten/Kota yang dibina
			50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina	50 Pendamping desa yang dibina
			Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina	Pendamping desa yang dibina
			Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa	Pembangunan Antar Desa
			Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa
15	Jumlah Desa yang menjadi Desa/Kampung/Kelurahan Iklim	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	122 Kampung Iklim	15 Kampung Iklim	40 Kampung Iklim	70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	15 Kampung Iklim	40 Kampung Iklim	70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	15 Kampung Iklim	40 Kampung Iklim	70 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim	105 Kampung Iklim

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

- a) Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun, Kondisi 841 Desa se- kalimantan Timur berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM)** tersebut terpetakan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Rekapitulasi Inputan Kuisioner Status Indeks Desa Membangun Tahun 2021
di Aplikasi IDM Tahun 2020, Kalimantan Timur

NO .	KABUPATEN	JUMLAH DESA	INPUTAN SELESAI		%	JUMLAH DESA BERDASARKAN STATUS						STATUR IDM TAHUN 2021
			SUDAH	BELUM		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TOTAL	
1.	PASER	139	139	0	100%	13	69	49	8	0	139	Maju
2.	KUTAI KARTANEGARA	193	193	0	100%	24	64	98	7	0	193	Maju
3.	BERAU	100	100	0	100%	11	38	50	1	0	100	Maju
4.	KUTAI BARAT	190	190	0	100%	19	65	87	18	1	190	Berkembang
5.	KUTAI TIMUR	139	139	0	100%	15	55	63	6	0	139	Maju
6.	PENAJAM PASER UTARA	30	30	0	100%	5	14	11	0	0	30	Maju
7.	MAHAKAM ULU	50	50	0	100%	0	7	29	14	0	50	Berkembang
TOTAL		841	841	0	100%	87	312	387	54	1	841	

Melihat kondisi besarnya jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalimantan Timur yaitu 308 dari 841 Desa. Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur maka yang menjadi isu penting adalah bagaimana mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal atau menaikkan status desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang, dan diharapkan akan mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri.

b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi
- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan

- Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan
- Belum tersedianya tanah kas Desa
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

c) Dampak

- Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
- Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan

d) Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

- **Tantangan** yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pelayanan antara lain :
 - 1) Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat)
 - 2) Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan
 - 3) Kualitas SDM belum optimal
 - 4) Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif
 - 5) Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif

- 6) Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
 - 7) Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar Desa
 - 8) Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG
- **Peluang** dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai Peluang dan berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :
- 1) Jumlah sumber daya manusia yang memadai;
 - 2) Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal;
 - 3) Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan; dan
 - 4) Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

Sedangkan beberapa hal yang dikategorikan sebagai Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 3) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- 4) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bumdesa;
- 5) Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 8) Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Timur untuk berkiprah lebih maksimal;
- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibawah koordiasi 2 (dua) Kementerian yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri; dan
- 10) Telah Terbentuknya LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

e) Rekomendasi Strategis Untuk Ditindaklanjuti

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah :

- Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan rujukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan pemerintahan kelurahan.

- Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas dibidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek lingkungan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.

- Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, menunjukkan bahwa RKPD telah selaras dan mengakomodir rumusan program dan kegiatan yang terdapat pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, yaitu 5 (lima) Program, 11 (sebelas) kegiatan dan 56 (lima puluh Enam) sub kegiatan dengan besaran pagu dana indikatif sesuai dengan yang diusulkan, Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan pada **Tabel T-C.31** sebagai berikut.

Tabel 2.8 T-C. 31.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RENJA RKPD TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Catatan
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
					20,555,409,086					24,055,409,086	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
Indikator Program : Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa											
I	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	1 Tahun							
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 PCS	38,250,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85 PCS	38,250,000	
II	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1 Tahun							
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	12,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	12,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan akhir tahun	1 Laporan	14,590,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan akhir tahun	1 Laporan	14,590,000	

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	18 Laporan	84,650,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	18 Laporan	182,048,000	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	800 Dokumen	17,210,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	800 Dokumen	26,210,000	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditanggapi	1 Dokumen	4,810,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditanggapi	1 Dokumen	4,810,000	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	340,800,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	340,800,000	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji ASN	12 Bulan	8,885,298,079	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji ASN	12 Bulan	8,885,298,079	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	3,980,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	3,980,000	
III	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum PD	1 Tahun					1 Tahun		

1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 jenis	223,110,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 jenis	295,110,000	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	21,033,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	21,033,600	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	6,681,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	6,681,000	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 jenis	1,262,467,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 jenis	1,262,467,800	
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 jenis	50,107,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 jenis	50,107,000	

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	780,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1,086,921,600	
IV	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	1 Tahun					1 Tahun		
1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1044 M2	228,448,000			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1044 M2	50,250,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit	28,000,000			Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit	41,000,000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	16 unit	78,988,000			Jumlah Kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	16 unit	78,988,000	
V	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD								

1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	0			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1,368,000,000	
2	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	3 jenis	174,220,000			Jumlah Pengadaan Mebel	3 jenis	174,220,000	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	-	-			-	-	-	
VI	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjuang Urusan PD	12 bulan					12 bulan		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3846 Mbps, 7879 M3, 122400 Kwh	325,682,383			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3846 Mbps, 7879 M3, 122400 Kwh	338,776,783	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1,755,218,224			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1,754,968,224	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	400,933,000			Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	400,933,000	
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	4,760,000			Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	4,760,000	

VII	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD								
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	414,186,000				5 dokumen	611,130,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	7,772,500				1 Dokumen	7,772,500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	6,868,500				1 Dokumen	6,868,500	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,340,000				1 Dokumen	7,340,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	16 Dokumen	11,736,000				16 Dokumen	11,736,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6,690,000				1 Dokumen	6,690,000	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	246,837,000				5 Dokumen	453,257,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (PROGRAM PRIORITAS)											
Indikator Program : Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa dan (Lembaga Ekonomi Desa) secara optimal											
VIII	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal	45 Desa					45 Desa		

1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		jumlah desa/ kampung berprestasi	1 desa/kampung 1 Kelurahan	62,400,000			jumlah desa/ kampung berprestasi	1 desa/kampung 1 Kelurahan	62,400,000	
2	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa		jumlah desa/kampung yang mengikuti inovasi perkembangan desa	1 desa dan 1 Kelurahan	18,000,000			jumlah desa/kampung yang mengikuti inovasi perkembangan desa	1 desa dan 1 Kelurahan	18,000,000	
3	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		jumlah laporan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	1 Kabupaten	37,800,000			jumlah laporan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	1 Kabupaten	37,800,000	
4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		jumlah laporan penetapan penegasan batas desa	7 Kabupaten	29,700,000			jumlah laporan penetapan penegasan batas desa	7 Kabupaten	292,470,000	
5	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Tersedia data pengelolaan aset desa	7 Kabupaten	66,106,000			Tersedia data pengelolaan aset desa	7 Kabupaten	66,106,000	
6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tersedianya data penggunaan SISKEUDES	7 Kabupaten	97,020,000			Tersedianya data penggunaan SISKEUDES	7 Kabupaten	417,020,000	
7	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		jumlah laporan peraturan daerah kab/kota dan jumlah laporan bupati/walikota	10 Kab/Kota	34,000,000			jumlah laporan peraturan daerah kab/kota dan jumlah laporan bupati/walikota	10 Kab/Kota	34,000,000	

8	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		jumlah desa/kel iklim	35 kampung	301,730,000			jumlah desa/kel iklim	35 kampung	351,730,000	
9	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		laporan fasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Kabupaten	16,800,000			laporan fasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Kabupaten	16,800,000	
10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		jumlah aparatur desa yang telah dilatih	35 Orang	240,375,000			jumlah aparatur desa yang telah dilatih	35 Orang	240,375,000	
11	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		jumlah bumdes yang aktif	35 BUMDes	358,024,500			jumlah bumdes yang aktif	35 BUMDes	418,024,500	
12	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	7 Kabupaten	17,400,000			Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	7 Kabupaten	17,400,000	
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang telah dilatih	35 orang	218,815,000			Jumlah Anggota BPD yang telah dilatih	35 orang	218,815,000	

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Indikator Program : Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan

IX	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan	30 Desa					30 Desa		
1	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		jumlah laporan penyenggaraan BBGRM	10 Kab/Kota	40,900,000			jumlah laporan penyenggaraan BBGRM	10 Kab/Kota	40,900,000	
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		jumlah posyantek yang aktif	10 Posyantek yang aktif	385,662,500			jumlah posyantek yang aktif	10 Posyantek yang aktif	517,662,500	
3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		jumlah desa yang PKK, posyandu, dan LPM aktif	35 desa	332,085,000			jumlah desa yang PKK, posyandu, dan LPM aktif	35 desa	452,085,000	

4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina	10 Pokma	187,245,000			Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina	10 Pokma	277,245,000	
5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan gerakan PKK	10 Kab/Kota	1,513,469,000			jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan gerakan PKK	10 Kab/Kota	1,513,469,000	
6	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		laporan hasil identifikasi dan pembinaan MHA	7 Kabupaten	211,459,000			laporan hasil identifikasi dan pembinaan MHA	7 Kabupaten	351,459,000	
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		jumlah LPN,KPM, karang taruna dan pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	150 orang	133,003,500			jumlah LPN,KPM, karang taruna dan pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	150 orang	205,103,500	
PROGRAM PENATAAN DESA											
Indikator Program : Kabupaten yang Telah Melaksanakan Penataan Desa											

X	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa	7 Kab					7 Kab		
1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	1 Kabupat en	66,150,000			Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	1 Kabupaten	66,150,000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Program Prioritas)											
Indikator Program : Desa berkembang											
XI	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Berkembang	30 Desa					30 Desa		
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Badan kerjasama Antar Desa Yang dibina	10 Kab/Kot a	554,037,500			Jumlah Badan kerjasama Antar Desa Yang dibina	10 Kab/Kota	702,837,500	
2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina	3 Kerjasa ma	40,869,000			Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina	3 Kerjasama	40,869,000	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kawasan perdesaan yang dibina	3 Kawasan	149,691,000			Kawasan perdesaan yang dibina	3 Kawasan	149,691,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, merupakan hasil analisis sesuai kebutuhan. Rumusan berdasarkan hasil Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi pelaksanaan Program tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Program dan Kegiatan merupakan analisis dan penelaahan Usulan pemangku kepentingan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan ke Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung dan Kelurahan se- Kalimantan Timur.

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Usulan Program dan Kegiatan dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 disajikan pada **Tabel T-C.32** sebagai berikut :

Tabel 2.9 T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur**

NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	6	7
				24,055,409,086	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Indikator Program : Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa					
I	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38,250,000	
II	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Keuangan	12,000,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan akhir tahun	14,590,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	182,048,000	
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	26,210,000	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditanggapi	4,810,000	
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	340,800,000	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji ASN	8,885,298,079	

8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,980,000	
III	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum PD		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	295,110,000	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,033,600	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,681,000	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,262,467,800	
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,107,000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,086,921,600	
IV	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD		
1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,250,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	41,000,000	

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	78,988,000	
V	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,368,000,000	
2	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	174,220,000	
VI	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjuang Urusan PD		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338,776,783	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,754,968,224	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400,933,000	
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,760,000	
VII	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	611,130,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan	7,772,500	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA	6,868,500	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD	7,340,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	11,736,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6,690,000	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	453,257,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (PROGRAM PRIORITAS)					
Indikator Program : Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa dan (Lembaga Ekonomi Desa) secara optimal					
VIII	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal		
1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		jumlah desa/ kampung berprestasi	62,400,000	
2	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa		jumlah desa/kampung yang mengikuti inovasi perkembangan desa	18,000,000	
3	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		jumlah laporan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	37,800,000	
4	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		jumlah laporan penetapan penegasan batas desa	292,470,000	
5	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Tersedia data pengelolaan aset desa	66,106,000	

6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Tersedianya data penggunaan SISKEUDES	417,020,000	
7	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa		jumlah laporan peraturan daerah kab/kota dan jumlah laporan bupati/walikota	34,000,000	
8	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		jumlah desa/kel iklim	351,730,000	
9	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		laporan fasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	16,800,000	
10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		jumlah aparatur desa yang telah dilatih	240,375,000	
11	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		jumlah bumdes yang aktif	418,024,500	
12	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	17,400,000	
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang telah dilatih	218,815,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
Indikator Program : Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan					

IX	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan		
1	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		jumlah laporan penyenggaraan BBGRM	40,900,000	
2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		jumlah posyantek yang aktif	517,662,500	
3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		jumlah desa yang PKK, posyandu, dan LPM aktif	452,085,000	
4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina	277,245,000	
5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan gerakan PKK	1,513,469,000	

6	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		laporan hasil identifikasi dan pembinaan MHA	351,459,000	
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		jumlah LPN,KPM, karang taruna dan pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	205,103,500	
PROGRAM PENATAAN DESA					
Indikator Program : Kabupaten yang Telah Melaksanakan Penataan Desa					
X	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat		Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa		
1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	66,150,000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Program Prioritas)					
Indikator Program : Desa berkembang					
XI	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Berkembang		
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Badan kerjasama Antar Desa Yang dibina	702,837,500	
2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina	40,869,000	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kawasan perdesaan yang dibina	149,691,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Rencana Kerja Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah terkait.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memilih prioritas salah satunya adalah meningkatkan jumlah Desa Berkembang, Maju dan Mandiri di Indonesia sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memprioritaskan pengentasan/penurunan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan seterusnya menjadi Desa Maju dan Mandiri. Dan disisi lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur juga melaksanakan Program dan Kegiatan yang sama dalam rangka mendukung pembangunan nasional terkait Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi Desa serta Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dan

disepakati bersama dalam Rapat Kordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas).

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Tingginya Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalimantan Timur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi isu strategis (Indikator Kinerja Utama) dalam penetapan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan ditindaklanjuti dengan Rancangan Perubahan Renja tahunan. Rencana Kerja Tahun 2022 disusun untuk meningkatkan status desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang dan seterusnya (Desa Maju dan Desa Mandiri) secara berjenjang.

Tujuan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan;
- b) Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat dan tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat;
- c) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e) Meningkatkan Pemerataan dan kualitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkeadilan;
- f) Meningkatkan koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Sasaran Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa :

- a) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
- b) Meningkatnya lembaga dan usaha ekonomi produktif masyarakat
- c) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- e) Meningkatkan Pembangunan desa dan Kawasan Perdesaan yang merata, berkualitas dan berkeadilan
- f) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan Kelurahan.

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor- Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Rumusan program dan kegiatan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Renstra 2023 guna mendukung dan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah sebagai berikut :

VISI : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat

Berani : Pemerintahan mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat

Berdaulat :

1. Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan public
2. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar
3. Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

Sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD 2018 - 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur bertekad mewujudkannya melalui Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

Misi I : **Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka kemampuan masyarakat khususnya meningkatkan peran Pemuda melalui Karang Taruna semakin ditingkatkan pengetahuan tentang penyalahgunaan Narkoba dengan tujuan Meminimalisir penyalahgunaan narkoba bagi kalangan generasi muda. Selain itu perlu peningkatan kualitas

SDM Aparatur Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang menangani Kepemudaan, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembangunan masyarakat lebih optimal.

Pemberdayaan Masyarakat juga dikembangkan dalam pengarusutamaan gender dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Misi 2 : **Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa maka ditingkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Perekonomian Desa dengan cara fasilitasi Pembangan Lembaga Ekonomi Desa, pembentukan Bumdes dan Pasar Desa, pelatihan manajemen Bumdes serta pelatihan Administrasi Bumdesa.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan juga dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas masyarakat terutama Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam usaha mengembangkan Wira Usaha Baru di Desa/Kelurahan secara merata dan berkeadilan.

Misi 3 : **Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

melalui Peningkatan perkembangan pokmas sapras Desa/Kel/KP-SPAMS; Peningkatan perkembangan sarana air minum dan sanitasi yang layak; Peningkatan jumlah masyarakat yang mampu mengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak ;Meningkatkan jumlah masyarakat yang mampu membina kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi yang layak. Disamping itu pelaksanaan pembangunan masyarakat berbasis desa membangun dan pembangunan kawasan dikembangkan untuk mewujudkan kedaulatan dan memenuhi kebutuhan infratraktur kewilayahan antara lain melalui peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Tata Ruang Desa ; peningkatkan Kualitas dan Pelaksanaan Dalam Penyusunan Serta Implementasi Regulasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan; Penyediaan Stimulan Dana Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Melalui Bantuan Keuangan ; Peningkatkan Akses Informasi dan Data Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Desiminasi Informasi dan Sistem Informasi Profile Desa; Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Komunikasi dan Informasi Perdesaan;

Peningkatkan Kualitas Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Serta Sistem Informasi Desa/Kelurahan melalui Pengkajian dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD); serta Peningkatkan Kapasitas Peran dan Fungsi Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Misi 4 : **Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal dan pemanfaatan Teknologi Tepat bertujuan untuk pengembangan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, meningkatkan nilai tambah serta berwawasan lingkungan serta selaras dengan konsep pembangunan hijau. Kualitas lingkungan yang baik dan sehat juga dikembangkan berbasis pembangunan kawasan dengan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi.

Misi 5 : **Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik**

Untuk mewujudkan Misi tersebut, melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Peningkatan pembinaan aparatur pemerintah desa dan pemerintah kelurahan ; Melakukan peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, dan aparatur Kelurahan ;Melakukan pembinaan dan pemantauan atas kebijakan daerah dalam penetapan pembiayaan desa melakukan koordinasi pembinaan bersama Kabupaten/Kota dalam rangka penataan dan administrasi desa/kelurahan ;Menyelenggarakan perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Melakukan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Desa dan pengelolaan aset Desa bagi aparatur desa.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka melalui Pemberdayaan masyarakat ditetapkan usaha-usaha sebagai berikut :

Pertama, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

Kedua, meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengatasi hal ini harus dilakukan dan difasilitasi oleh pihak pemerintah melalui penetapan kebijakan, pengembangan instrumen implementasi (dalam bentuk pedoman, petunjuk teknis, atau panduan), peningkatan kemampuan aparatur dan masyarakat (melalui sosialisasi, orientasi, pelatihan, atau bimbingan teknis), serta supervisi pemantauan dan evaluasi.

Dengan demikian peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa lima tahun kedepan akan mampu memberikan keseimbangan antara upaya penguatan masyarakat melalui lembaga

kemasyarakatannya, yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan penetapan kebijakan pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam proses pembangunan, dengan penekanan pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan aspek lingkungan serta pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Rekapitulasi Rumusan Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, penyebaran lokasi dan kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dijelaskan pada **Tabel T-C. 33** sebagai berikut :

Tabel 3.1 T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kepmendagri 50	Rencana Akhir Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuahan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
	Indikator Program : Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa									
2.13.01.1.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah								
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kalimantan Timur	85 Pcs	38,250,000	PAD			
2.13.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran								
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kalimantan Timur	12 Laporan	12,000,000	PAD			
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kalimantan Timur	1 Laporan	14,590,000	PAD			

2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan, triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Kalimantan Timur	18 Laporan	182,048,000	PAD			
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kalimantan Timur	800 Dokumen	26,210,000	PAD			
2.13.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan yang ditanggapi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kalimantan Timur	18 Laporan	4,810,000	PAD			
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Timur	12 Bulan	340,800,000	PAD			
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Timur	12 Bulan	8,885,298,079	PAD			
2.13.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Timur	2 Laporan	3,980,000	PAD			
2.13.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum PD			1 Tahun					
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kalimantan Timur	8 Jenis	295,110,000	PAD			
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kalimantan Timur	4 Jenis	21,033,600	PAD			

2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	4 Jenis	6,681,000	PAD			
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	11 Jenis	1,262,467,800	PAD			
2.13.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kalimantan Timur	2 Jenis	50,107,000	PAD			
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	1 Dokumen	1,086,921,600	PAD			
2.13.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD		Kalimantan Timur	1 Tahun		PAD			
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kalimantan Timur	1044 M2	50,250,000	PAD			
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kalimantan Timur	2 Unit	41,000,000	PAD			
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang diperpanjang STNK	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kalimantan Timur	16 Unit	78,988,000	PAD			

2.13.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik daerah Penunjuang Urusan PD			1 Tahun					
2.13.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Kalimantan Timur	Unit	1,368,000,000	PAD			
2.13.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kalimantan Timur	3 Jenis	174,220,000	PAD			
2.13.01.1.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjuang Urusan PD			12 bulan					
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kalimantan Timur	3846 Mbps, 7879 M3, 122400 kwh	338,776,783	PAD			
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	1 Tahun	1,754,968,224	PAD			
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	10 Jenis	400,933,000	PAD			
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	1 Dokumen	4,760,000	PAD			
2.13.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja PD			1 Tahun					
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	5 Dokumen	611,130,000	PAD			

2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1 Dokumen	7,772,500	PAD			
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kalimantan Timur	1 Dokumen	6,868,500	PAD			
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1 Dokumen	7,340,000	PAD			
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Timur	16 Dokumen	11,736,000	PAD			
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kalimantan Timur	1 Dokumen	6,690,000	PAD			

2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	5 Dokumen	453,257,000	PAD			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (PROGRAM PRIORITAS)									
	Indikator Program : Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa dan (Lembaga Ekonomi Desa) secara optimal									
2.13.04.1.01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal			45 Desa					
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa/ kampung berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kalimantan Timur	1 desa/kampung, 1 kelurahan	62,400,000	PAD			
2.13.04.1.01.21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	jumlah desa/kampung yang mengikuti inovasi perkembangan desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Kalimantan Timur	1 desa/kampung, 1 kelurahan	18,000,000	PAD			
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah laporan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kalimantan Timur	1 Kabupaten	37,800,000	PAD			
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah laporan penetapan penegasan batas desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kalimantan Timur	7 Kabupaten	292,470,000	PAD			
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Tersedia data pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kalimantan Timur	7 Kabupaten	66,107,000	PAD			

2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya data penggunaan Siskeudes	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kalimantan Timur	7 Kabupaten	417,020,000	PAD			
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	jumlah laporan peraturan daerah kab/kota dan jumlah laporan bupati/walikota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	34,000,000	PAD			
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah desa/kel iklim	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan. Perencanaan. Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Kalimantan Timur	35 Kampung	351,730,000	PAD			
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	laporan fasilitasi peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kalimantan Timur	7 Kabupaten	16,800,000	PAD			
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah aparatur desa yang telah dilatih	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Kalimantan Timur	35 orang	240,375,000	PAD			

2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	jumlah bumdes yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kalimantan Timur	35 Bumdes	418,024,500	PAD			
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Kalimantan Timur	7 Kabupaten	17,400,000	PAD			
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang telah dilatih	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kalimantan Timur	35 orang	218,815,000	PAD			
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									
	Indikator Program : Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan									
2.13.05.1.01	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas	jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yg lembaga kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPN, dan pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan			30 Desa					

	Daerah Kabupaten/Kota									
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah laporan penyelenggaraan BBGRM	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	40,900,000	PAD			
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah posyantek yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kalimantan Timur	10 Posyantek yang aktif	517,662,500	PAD			
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah desa yang PKK, posyandu, dan LPM aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kalimantan Timur	35 Desa	452,085,000	PAD			
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dibina	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kalimantan Timur	10 Pokmas	277,245,000	PAD			

2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	jumlah laporan hasil pembinaan penyelenggaraan gerakan PKK	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	1,513,469,000	PAD			
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	laporan hasil identifikasi dan pembinaan MHA	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kalimantan Timur	7 Kabupaten	351,459,000	PAD			
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	jumlah LPN,KPM, karang taruna dan pokmas yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Kalimantan Timur	150 orang	205,103,500	PAD			
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA									
	Indikator Program : Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa									
2.13.02.1.01	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Kabupaten yang telah melaksanakan penataan desa			7 Kab					
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Kalimantan Timur	35 Desa	452,085,000	PAD			

2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA (Program Prioritas)									
	Indikator Program : Desa berkembang									
2.13.03.1.01	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Berkembang			30 Desa					
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan kerjasama Antar Desa Yang dibina	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	10 Kab/Kota	702,837,500	PAD			
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kerjasama desa dengan pihak ketiga yang dibina	jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Kalimantan Timur	3 kerjasama	40,869,000	PAD			
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kawasan perdesaan yang dibina	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kalimantan Timur	3 Kawasan	149,691,000	PAD			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebagai berikut :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat.;

9. Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi;
10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
11. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Didang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota.

C. Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
9. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
13. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
14. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
15. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
23. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
24. Pengadaan Mebel;
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
26. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
28. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
32. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa;
33. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota;
34. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga;
35. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
36. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
37. Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa;
38. Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

39. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
40. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
41. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa;
42. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa;
43. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa;
44. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
45. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
46. Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
47. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
48. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa;
49. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
50. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
51. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
52. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

53. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
54. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; dan
55. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat.

D. Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Pagu Indikatif sebesar 24,055,409,086.00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) untuk pembiayaan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan.

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dalam bidang pemberdayaan, mengadopsi kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

- a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022;
- b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2023; dan
- c. Acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Rancangan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimasa mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat.

Samarinda, Juni 2022

Kepala,

H.M. Syirajudin, SH.MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19660208 198701 1 003